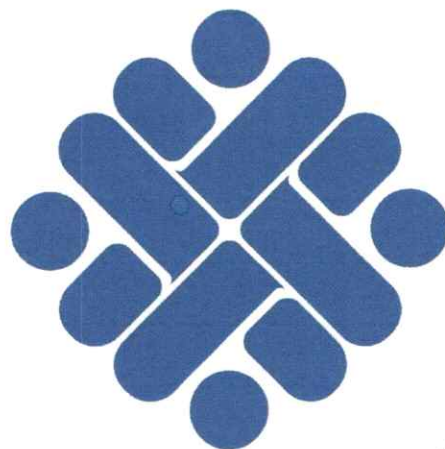


RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN 2025



DINAS TENAGA KERJA KOTA PANGKALPINANG

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Renja perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode satu tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap perangkat daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra perangkat daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen perangkat daerah, Renja perangkat daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada perangkat daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah, sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan Renstra perangkat daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah. Renja Perangkat daerah disusun oleh masing-masing perangkat daerah secara partisipatif.

Dokumen ini akan menjadi salah satu acuan dalam proses penyusunan Rencana Kerja Anggaran perangkat daerah Tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perubahan Dinas Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang Tahun 2025 ini yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 04 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), dan Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024 Nomor 46);
13. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun

2022 Nomor 11 Seri E);

14. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 Nomor 144);
15. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 40 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Renstra Perangkat Daerah Kota Pangkalpinnag Tahun 2024 – 2026, dan Peraturan Wali Kota Pangkalpinang Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penetapan Renja Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2025.
16. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 8 Tahun 2025 Tanggal 27 Mei 2025 tentang Perubahan RKPD Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2025 Nomor 277);

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rancangan P-Renja Tenaga Kerja Tahun 2025 adalah untuk menentukan arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dinas.

Adapun tujuan penyusunan dokumen ini adalah untuk :

1. Mengetahui pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2026;
2. Sebagai sarana untuk mengukur sumber daya serta kemampuan dalam mencapai pelayanan kinerja melalui evaluasi kinerja;

3. Mewujudkan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran;
4. Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2025

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Renja tahun 2025 disusun dengan mengikuti sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 1.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 1.2 Tujuan dan Sasaran SKPD
- 1.3 Program dan Kegiatan SKPD

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Triwulan I Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Berdasarkan tabel diatas dapat dijabarkan bahwa Dinas Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang memiliki anggaran APBD 2025 sebesar Rp. 3.046.853.046,- dengan mengampu 5 (lima) program, 9 (sembilan) kegiatan dan 21 sub kegiatan, untuk Pagu yang mengalami efisiensi Belanja Perjalanan Dinas (SPPD) sebesar 2.896.762.275,- sedangkan untuk pagu APBDP Perubahan yang sudah ditambah dengan kekurangan Gaji sebesar Rp.3.496.762.275,- dengan mengampu 4 (empat) program, 8 (delapan), kegiatan dan 16 (enam belas) sub kegiatan.

TRIWULAN I
Evaluasi Terhadap Hasil Renja
Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang Tahun 2025

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025			Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2025												Realisasi Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-Jawab					
					6		Rp	7				8		9		10		11				12				
					K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4	5																					13	

14	-	021801	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	87	2.255.493.090	81,92	793.199.163										0	82	793.199.163	94.161	35.167	SEKRETARIAS			
				Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	77		78,90												79		102.468		SEKRETARIAS			
				Persentase kontribusi retribusi daerah terhadap PAD (Dengan Satuan:%)	4,64		0												0		0,000		SEKRETARIAS			
15		021801202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tersusunya laporan keuangan perangkat daerah sesuai SAP (Dengan Satuan:%)	100	1.727.792.939	25	647.214.265										0	25	647.214.265	25		37	SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN		
16		021801202001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	23	1.727.792.939	25	647.214.265											25	647.214.265	109		37	SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN		
17		021801205	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin ASN (Dengan Satuan:%)	100	0																		SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN		
19		021801205009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Dengan Satuan:Orang)	10	0																		SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN		
20		021801206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah (Dengan Satuan:%)	100	253.305.363	81	26.016.750										0	81	26.016.750	81		10	SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN		

21	021801206001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	5.352.500	100	3.389.500											100	3.389.500	10000	63	SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
22	021801206002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	8	77.780.000	4																SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
23	021801206004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	2	85.084.663	100	7.198.000															SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
24	021801206005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	2	35.088.200	100	8.069.250															SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
25	021801206009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi SKPD dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	50.000.000	100	7.360.000															SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
26	021801207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengadaan barang milik perangkat daerah (Dengan Satuan:%)	100	0																	SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
27	021801207010	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	1	0																	SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
28	021801208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase teraktasannya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:%)	100	185.534.788	50	46.517.848															SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
29	021801208002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1	81.400.000	25	12.686.000															SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
30	021801208003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1	25.050.000	100	16.170.000															SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
31	021801208004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1	79.084.788	25	17.661.848															SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

3	02070201001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Dengan Satuan:Orang)	45	285.160.000	5												0	SUB KORDINATOR PERLU A.S.A.N. PENEMPATAN, PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS	11	6.329	0	0,000
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																							
PREDIKAT KINERJA																							
4	020704	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	persentase pencari kerja yang didaftarkan (Dengan Satuan:%)	45	274.723.260	15	15.635.848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,691 BIDANG KETENAGAKERJAAN	33.333	15.635.848	0	0
5	020704203	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah laporan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja (Dengan Satuan:laporan)	1	274.723.260	15	15.635.848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 SUB KORDINATOR PERLU A.S.A.N. PENEMPATAN, PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS	1500	15.635.848	0	0
6	02070420302	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) (Dengan Satuan:Orang)	120	136.611.000	25	15.635.848												11 SUB KORDINATOR PERLU A.S.A.N. PENEMPATAN, PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS	21	15.635.848	0	0
7	02070420303	Job Fair /Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja (Dengan Satuan:Orang)	60	138.112.260	5													0 SUB KORDINATOR PERLU A.S.A.N. PENEMPATAN, PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS	8		0	0
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																							
PREDIKAT KINERJA																							
8	020705	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB) (Dengan Satuan:%)	45	180.016.696	19	8.208.616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,560 BIDANG KETENAGAKERJAAN	42.222	8.208.616	0	0
9	020705201	Pengesaan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan yang telah memiliki PP/PKB (Dengan Satuan:%)	8,48	68.090.000	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 SUB KORDINATOR SYARAT KERJA DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA	47	0	0	0
10		Pengesaan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesaan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan terdaftar di WLP Online (Dengan Satuan:perusahaan)	70	47.960.000	4													0 SUB KORDINATOR SYARAT KERJA DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA	6	0	0	0

[illegible]

Dilevaluasi

Kota Pangkalpinang, tanggal 07-02-2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA KOTA PANGKALPINANG
ENDANG SUPRIYADI, S.T., M.T. NIP.197606122000031003

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan tenaga kerja Kota Pangkalpinang adalah analisis terhadap capaian kinerja serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk menyusun program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yaitu tenaga kerja.

Pencapaian IKU Dinas Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang Tahun 202 dapat dilihat pada tabel berikut:

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Terciptanya hubungan industrial yang harmonis	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	76,36%	54,55 %	71,43%
	Persentase perusahaan yang telah memiliki PP/ PKB	19,09%	16,67%	87,32%

Sedangkan capaian IKU Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Realisasi Jan-Juni 2025
1.	Meningkatkan persentase tenaga kerja yang ditempatkan		Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	%	6,90
		Terciptanya hubungan industrial yang harmonis	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	%	$= \frac{9}{12} \times 100\% = 75\%$
			Persentase perusahaan yang telah memiliki PP/ PKB	%	$= \frac{10}{412} \times 100\% = 2,43\%$
2.	Meningkatkan laju pertumbuhan realisasi investasi		Laju pertumbuhan realisasi investasi PMDN	%	$\frac{(251643484268,533 - 1710403669)}{171040366995} \times 100$ $= 47,12\%$
		Meningkatnya realisasi investasi	Nilai realisasi investasi PMDN	Milyar Rupiah	Rp.251.643.484.268,533

2.3 Isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Berikut ini tercantum isu penting penyelenggaraan dinas berdasarkan tugas dan fungsi yang dilaksanakan, yang mungkin di kemudian hari dapat diselesaikan demi optimalnya pelaksanaan tugas :

1. Tingginya angka pengangguran di kota Pangkalpinang;
2. Rendahnya kompetensi dan kualitas pencari kerja untuk memasuki pasar kerja;
3. Belum optimalnya penerapan tata kelola kerja yang layak pada perusahaan

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD

Ranwal RKPD							Hasil analisis kebutuhan				
Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tahun 2025		Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tahun 2025	
				Target capaian kinerja	Pagu indikator					Target capaian kinerja	Pagu indikator
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	PGK	Jumlah Kebijakan Pembangunan Ketenagakerjaan Daerah yang ditetapkan	kebijakan	1	51.460.000	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	PGK	Jumlah Kebijakan Pembangunan Ketenagakerjaan Daerah yang ditetapkan	kebijakan	1	51.460.000
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	PGK	jumlah laporan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	laporan	1	51.460.000	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	PGK	jumlah laporan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	laporan	1	51.460.000
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	PGK	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	dokumen	1	51.460.000	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	PGK	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	dokumen	1	51.460.000
Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	PGK	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	orang	50	51.460.000	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	PGK	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	orang	50	51.460.000
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	PGK	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	%	79	285.160.000	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	PGK	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	%	79	285.160.000

[illegible]

bagi Perusahaan	Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdafar di WLKP Online				bagi Perusahaan		Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdafar di WLKP Online		
Penyelengga raan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	PGK	PGK	55	20.130.000	Penyelengga raan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	PGK	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdafar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	laporan	55 20.130.000
Pencegahan dan Penyelesaian n Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/K ota	PGK	PGK	1	111.926.696	Pencegahan dan Penyelesaian n Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota	PGK	jumlah laporan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota	laporan	1 111.926.696
Pencegahan Perselisihan	PGK	PGK	50	52.380.000	Pencegahan Perselisihan	PGK	Jumlah Perselisihan yang	perkiraan	50 52.380.000

[illegible]

<i>Daerah</i>	<i>disiplin ASN</i>				<i>Daerah</i>		<i>ASN</i>		
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	PGK	org	-		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	PGK	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	org	-
<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	PGK	%	100		<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	PGK	<i>Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah</i>	%	100
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PGK	paket	1	5.352.500	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PGK	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	1
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PGK/ Luar PGK	paket	8	77.780.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PGK/ Luar PGK	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	8
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PGK	paket	2	85.084.663	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PGK	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	2
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	PGK	paket	2	35.088.200	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	PGK	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	2
Penyelenggaraan Rapat	PGK	laporan	-		Penyelenggaraan Rapat	PGK	Jumlah Laporan Penyelenggaraan	laporan	1

Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>PGK</i>	<i>Persentase pengadaan barang milik perangkat daerah</i>	<i>%</i>	<i>100</i>	<i>88.860.000</i>	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>PGK</i>	<i>Persentase pengadaan barang milik perangkat daerah</i>	<i>%</i>	<i>100</i>	<i>88.860.000</i>		
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PGK	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	unit	1	38.680.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PGK	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	unit	1	38.680.000		
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PGK	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	1	337.470.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PGK	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	1	337.470.000		
<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>PGK</i>	<i>Persentase terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>%</i>	<i>100</i>	<i>-</i>	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>PGK</i>	<i>Persentase terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>%</i>	<i>100</i>	<i>-</i>		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PGK	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	laporan	1	85.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PGK	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	laporan	1	85.000.000		

		Daya Air dan Listrik yang Disediakan							Disediakan			
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PGK	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan	1	46.250.000				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan	1	46.250.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PGK	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	1	-				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	1	-
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PGK	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	%	100	-				Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	%	100	-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	PGK	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	unit	1	38.680.000				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	unit	1	38.680.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan	PGK	Jumlah Kendaraan Dinas	unit	1	-				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau	unit	1	-

n, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	1	50.180.000	3.046.853.046	n, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	1	50.180.000	3.046.853.046
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir rehabilitasi	PGK	unit	1	50.180.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	50.180.000	3.046.853.046

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS TENAGA KERJA KOTA PANGKAL PINANG

[illegible]

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tidak tersedia usulan program dan kegiatan dari masyarakat untuk tahun 2025.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN, PROGRAM PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Tema RKP pada 2025 adalah Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Yang diwujudkan melalui arah kebijakan prioritas pembangunan yang meliputi: Sumber Daya Manusia berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa; Infrastruktur Berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur IKN, hingga reformasi pengelolaan sampah; serta Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan, yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan.

Prioritas Kota Pangkalpinang Tahun 2025 :

1. Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah;
2. Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem
3. Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesejahteraan Serta Daya Saing Masyarakat
4. Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan
5. Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan
6. Peningkatan Kompetensi dan Keterampilan Angkatan Kerja Sesuai Kebutuhan Pasar Kerja
7. Peningkatan kualitas pembangunan gender

Pencapaian pembangunan daerah tidak terlepas dari peran perangkat daerah, dengan mengaitkan kebijakan daerah dengan perangkat daerah menjadi salah satu tahapan penting dalam melihat konsistensi antara implementasi pelaksanaan pembangunan dengan perencanaan pembangunan. Keberhasilan pencapaian IKU daerah memerlukan kontribusi capaian perangkat daerah di Kota Pangkalpinang. Keterkaitan tujuan dan sasaran Dinas dijabarkan melalui tabel keterkaitan tujuan sasaran Kota dengan Dinas, dimana tujuan sasaran tersebut dicapai melalui pelaksanaan program kegiatan seperti yang terdapat pada bab enam dokumen Renja ini

TUJUAN KOTA	IND TUJUAN KOTA	SASARAN KOTA	IND SASARAN KOTA	TUJUAN OPD	IND TUJUAN OPD	SASARAN OPD	IND SASARAN OPD
mewujudkan SDM dan kesejahteraan masyarakat yang berdaya saing	Tingkat Kemiskinan	meningkatnya kualitas kesempatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	Meningkatkan persentase tenaga kerja yang ditempatkan	TPAK	Terciptanya hubungan industrial yang harmonis	persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/ PKB, LKS Bipartit, struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi

	- Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER);	√
	- Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi;	√
	- Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata;	√
	- Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan;	√
	- Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja;	
	- Data pemberdayaan pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya; Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang ditentukan	

3.2 Tujuan dan Sasaran P-Renja

Tujuan dan sasaran Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 sesuai dengan Renstra Perubahan Tahun 2024-2026 seperti pada tabel berikut:

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tahun ke		
				2021	2022	2023
Meningkatkan persentase tenaga kerja yang ditempatkan		Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	%	60	61	62
	Terciptanya hubungan industrial yang harmonis	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	%	94,55	67,27	76,36
		Persentase perusahaan yang telah memiliki PP/ PKB	%	13,03	16,06	19,09

Sedangkan tujuan dan sasaran tahun 2024-2026 berdasarkan Renstra Transisi Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
				2021	2022	2024	2025	2026	
Meningkatkan persentase tenaga kerja yang ditempatkan		TPAK	%	65,16	65,78	60	61	62	62
	Terciptanya hubungan industrial yang harmonis	persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/ PKB, LKS Bipartit, struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	100,00	6,89	90,00	90,00	90,00	90,00
		persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	%	6,03	7,09	6,40	6,90	7,10	7,10

3.3 Program dan Kegiatan

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kota Pangkalpinang Tahun 2025 berikut:

Tujuan RPD:
mewujudkan SDM dan kesejahteraan masyarakat yang berdaya saing
Sasaran RPD:
meningkatnya kualitas kesempatan kerja

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja perlu melaksanakan program, kegiatan serta sub kegiatan:

Kode						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
2	07	02				PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA
2	07	02	2	01		<i>KEGIATAN</i> Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
2	07	02	2	01	0001	SUB KEGIATAN Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
2	07	02	2	01	0003	SUB KEGIATAN Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro
2	07	03				PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
2	07	03	2	01		<i>KEGIATAN</i> Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
2	07	03	2	01	0001	SUB KEGIATAN Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
2	07	04				PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
2	07	04	2	03		<i>KEGIATAN</i> Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
2	07	04	2	03	0002	SUB KEGIATAN Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
2	07	04	2	03	0003	SUB KEGIATAN Job Fair/Bursa Kerja
2	07	05				PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
2	07	05	2	01		<i>KEGIATAN</i> Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

2	07	05	2	01	0001	SUB KEGIATAN Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan
2	07	05	2	01	0003	SUB KEGIATAN Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan
2	07	05	2	01		KEGIATAN Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
2	07	05	2	01	0001	SUB KEGIATAN Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2	07	05	2	01	0002	SUB KEGIATAN Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
2	07	05	2	01	0003	SUB KEGIATAN Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi
2	07	05	2	01	0004	SUB KEGIATAN Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota
2	07	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
2	07	01	2	02		KEGIATAN <i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>
2	07	01	2	02	0001	SUB KEGIATAN penyediaan gaji dan tunjangan ASN
2	07	01	2	05		KEGIATAN <i>administrasi kepegawaian perangkat daerah</i>
2	07	01	2	05	0009	SUB KEGIATAN pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
2	07	01	2	06		KEGIATAN <i>Administrasi Umum perangkat daerah</i>
2	07	01	2	06	0001	SUB KEGIATAN penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
2	07	01	2	06	0002	SUB KEGIATAN Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2	07	01	2	06	0004	SUB KEGIATAN penyediaan bahan logistik kantor
2	07	01	2	06	0005	SUB KEGIATAN penyediaan barang cetakan dan penggandaan
2	07	01	2	06	0009	SUB KEGIATAN penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
2	07	01	2	07		KEGIATAN <i>pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</i>
2	07	01	2	07	0001	SUB KEGIATAN Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2	07	01	2	07	0002	SUB KEGIATAN Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2	07	01	2	08		KEGIATAN <i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>

2	07	01	2	08	0002	SUB KEGIATAN Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2	07	01	2	08	0003	SUB KEGIATAN penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
2	07	01	2	08	0004	SUB KEGIATAN penyediaan jasa pelayanan umum kantor
2	07	01	2	09		KEGIATAN <i>pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</i>
2	07	01	2	09	0001	SUB KEGIATAN penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
2	07	01	2	09	0002	SUB KEGIATAN Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2	07	01	2	09	0009	SUB KEGIATAN pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kerja Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD), adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana kerja (work plan report) tahun 2024 yang disusun ini merupakan uraian lebih lanjut secara periodik dari Rencana Strategi (strategic plan report). Rencana strategi atau disebut dengan Renstra sebagaimana diketahui merupakan rencana umum lima tahunan yang harus diuraikan lebih lanjut ke dalam rencana tahunan agar program dan kegiatan lebih terfokus. Dengan adanya rencana kerja yang telah tersusun dengan baik diharapkan kinerja organisasi dapat semakin baik dan lebih terfokus. Renja PD memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang.

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / PROGRAM / PROGRAM / KEGIATAN	INDUKTOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KENDARAAN BERSEKUTU	REALISASI CAPAIAN KENDARAAN BERSEKUTU	PILIHAN TARGET TAHUN 2021	TARIF ZET			PAU INDIKATIF (Rp)			CAPAIAN KENDARAAN BERSEKUTU			LOKASI	EMBED DATA	PRIORITAS		KELOMPOK SUMBER	PRIBADI KENDARAAN BERSEKUTU			PEKERJAAN KENDARAAN BERSEKUTU																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
							SEBELUM	SEKUTU	SEKUTU	APRIL 2021	MAY 2021	JUN 2021	JUL 2021	AGUST 2021	SEPT 2021			OKT 2021	NOV 2021		DES 2021	JAN 2022	FEB 2022		MAR 2022	APR 2022	MAY 2022	JUN 2022	JUL 2022	AGUST 2022	SEPT 2022	OKT 2022	NOV 2022	DES 2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
																																			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
2.07.01.2.06.0001		Penyediaan Jasa Perawatan dan Perbaikan Kendaraan	Akses Layanan Perawatan dan Perbaikan Kendaraan	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN SUB KEGIATAN	INDUKSIAN PROGRAM / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	TARGET RENDITE BENDERA OPD	REALISASI RENDITE BENDERA TAHUN 2023	PILAKSIAN RENDITE BENDERA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN FINIERIA DAN KERANGKA PERDAAN					KELMPOK SASARAN	PRABLAN MAJU BERKANA TAHUN 2028		PERANGKAT DAIRAH PENGANG KURANG JANAS						
							TARJET REB	PAUO INDIKATIF (Rp)		LOKASI	EMBER DANA		PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)				
								SEBELUM	SEKUALAH				APRO 2023	RHPO PERUMAHAN 2023				NASIONAL	DAIRAH		
1	2	2.07.24.2.0.0.002	2.07.24.2.0.0.002	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2.07.24.2.0.0.002	2.07.24.2.0.0.002	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2.07.24.2.0.0.002	2.07.24.2.0.0.002	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2.07.24.2.0.0.002	2.07.24.2.0.0.002	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2.07.24.2.0.0.002	2.07.24.2.0.0.002	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2.07.24.2.0.0.002	2.07.24.2.0.0.002	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2.07.24.2.0.0.002	2.07.24.2.0.0.002	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2.07.24.2.0.0.002	2.07.24.2.0.0.002	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2.07.24.2.0.0.002	2.07.24.2.0.0.002	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2.07.24.2.0.0.002	2.07.24.2.0.0.002	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2.07.24.2.0.0.002	2.07.24.2.0.0.002	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2.07.24.2.0.0.002	2.07.24.2.0.0.002	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2.07.24.2.0.0.002	2.07.24.2.0.0.002	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2.07.24.2.0.0.002	2.07.24.2.0.0.002	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2.07.24.2.0.0.002	2.07.24.2.0.0.002	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2.07.24.2.0.0.002	2.07.24.2.0.0.002	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2.07.24.2.0.0.002	2.07.24.2.0.0.002	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2.07.24.2.0.0.002	2.07.24.2.0.0.002	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2.07.24.2.0.0.002	2.07.24.2.0.0.002	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2.07.24.2.0.0.002	2.07.24.2.0.0.002	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2.07.24.2.0.0.002	2.07.24.2.0.0.002	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2.07.24.2.0.0.002	2.07.24.2.0.0.002	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2.07.24.2.0.0.002	2.07.24.2.0.0.002	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2.07.24.2.0.0.002	2.07.24.2.0.0.002	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2.07.24.2.0.0.002	2.07.24.2.0.0.002	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2.07.24.2.0.0.002	2.07.24.2.0.0.002	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2.07.24.2.0.0.002	2.07.24.2.0.0.002	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2.07.24.2.0.0.002	2.07.24.2.0.0.002	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2.07.24.2.0.0.002	2.07.24.2.0.0.002	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2.07.24.2.0.0.002	2.07.24.2.0.0.002	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2.07.24.2.0.0.002	2.07.24.2.0.0.002	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2.07.24.2.0.0.002	2.07.24.2.0.0.002	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2.07.24.2.0.0.002	2.07.24.2.0.0.002	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2.07.24.2.0.0.002	2.07.24.2.0.0.002	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2.07.24.2.0.0.002	2.07.24.2.0.0.002	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2.07.24.2.0.0.002	2.07.24.2.0.0.002	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2.07.24.2.0.0.002	2.07.24.2.0.0.002	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2.07.24.2.0.0.002	2.07.24.2.0.0.002	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2.07.24.2.0.0.002	2.07.24.2.0.0.002	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2.07.24.2.0.0.002	2.07.24.2.0.0.002	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2.07.24.2.0.0.002	2.07.24.2.0.0.002	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2.07.24.2.0.0.002	2.07.24.2.0.0.002	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2.07.24.2.0.0.002	2.07.24.2.0.0.002	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2.07.24.2.0.0.002	2.07.24.2.0.0.002	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2.07.24.2.0.0.002	2.07.24.2.0.0.002	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2.07.24.2.0.0.002	2.07.24.2.0.0.002	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2.07.24.2.0.0.002	2.07.24.2.0.0.002	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2.07.24.2.0.0.002	2.07.24.2.0.0.002	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2.07.24.2.0.0.002	2.07.24.2.0.0.002	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2.07.24.2.0.0.002	2.07.24.2.0.0.002	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2.07.24.2.0.0.002	2.07.24.2.0.0.002	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2.07.24.2.0.0.002	2.07.24.2.0.0.002	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2.07.24.2.0.0.002	2.07.24.2.0.0.002	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2.07.24.2.0.0.002	2.07.24.2.0.0.002	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2.07.24.2.0.0.002	2.07.24.2.0.0.002	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2.07.24.2.0.0.002	2.07.24.2.0.0.002	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2.07.24.2.0.0.002	2.07.24.2.0.0.002	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2.07.24.2.0.0.002	2.07.24.2.0.0.002	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2.07.24.2.0.0.002	2.07.24.2.0.0.002	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2.07.24.2.0.0.002	2.07.24.2.0.0.002	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2.07.24.2.0.0.002	2.07.24.2.0.0.002	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2.07.24.2.0.0.002	2.07.24.2.0.0.002	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2.07.24.2.0.0.002	2.07.24.2.0.0.002	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2.07.24.2.0.0.002	2.07.24.2.0.0.002	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2.07.24.2.0.0.002	2.07.24.2.0.0.002	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2.07.24.2.0.0.002	2.07.24.2.0.0.002	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2.07.24.2.0.0.002	2.07.24.2.0.0.002	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2.07.24.2.0.0.002	2.07.24.2.0.0.002	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	1		

BAB V

PENUTUP

Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025 ini merupakan rencana kerja tahunan dalam menunjang tercapainya tujuan sasaran RPD Kota Pangkalpinang Tahun 2024 – 2026.

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025 maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran tujuan sasaran RPD Kota Pangkalpinang diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kota Pangkalpinang maupun dengan Perangkat Daerah yang membidangi fungsi lain.